



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 228/PL.02-Kpt/6109/Kab /XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab /X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 9/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis

Pemutakhiran ...

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 11 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penyusunan pedoman teknis ini meliputi :

1. Hak memilih;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan;
4. Sistem informasi data pemilih;
5. Pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah

berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah system elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, pemutakhiran, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

28. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
5. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyusunan Daftar Pemilih

1. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU menggunakan formulir Model A-KWK.
2. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memerhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Memudahkan Pemilih;
 - e. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar Pemilih Sementara
 - a. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih.
 - b. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
 - c. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS;
 - e. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. jadwal pelaksanaan Coklit;
 2. persiapan pelaksanaan Coklit;

3. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 4. tata cara pengisian formulir.
- f. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 2. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 3. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 4. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 5. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 7. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 8. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 9. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 10. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- g. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- h. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

- i. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kedalam formulir Model A.A.3-KWK.
- j. PPDP menyampaikan dokumen hasil Kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - 1. Formulir Model A-KWK yang telah di gunakan;
 - 2. Formulir Model A.A-KWK yang dikebalikan;
 - 3. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - 4. Formulir Model A.A.3-KWK.
- k. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
- l. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - 1. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - 2. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - 3. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir model A.A.3-KWK.
- m. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- n. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit PPDP.
- o. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *Softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi Syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan Formulir A.B-KWK.
- p. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- q. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- r. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan di tuangkan ke dalam berita acara yang di tandatangani oleh ketua dan Anggota PPS.
- s. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

- t. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- u. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- v. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- w. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- x. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
- y. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- z. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan di tuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- aa. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- bb. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- cc. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- dd. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- ee. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemuktahiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- ff. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - 1. KPU Kabupaten;
 - 2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3. Panwas Kecamatan;
 - 4. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

- gg. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- hh. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan di tuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- ii. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- jj. Dalam rapat pleno sebagai mana dimaksud, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- kk. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan lokasi TPS.
- ll. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- mm. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS, kedalam formulir Model A.1.1-KWK.
- nn. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Model A.1.1-KWK kepada:
 - 1. KPU Provinsi;
 - 2. KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3. Panwas Kabupaten;
 - 4. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 5. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- oo. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- pp. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - 1. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3. PPS.

- qq. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Dokumen Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
 - rr. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
 - ss. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah di jangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
 - tt. KPU kabupaten dapat melakukan uji publik DPS dengan di bantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
2. Daftar Pemilih Tetap
- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
 - b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - 1. Pemilih yang telah memenuhi syarat;
 - 2. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indoensia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - 4. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - 6. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;

7. Pemilih terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- f. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- h. PPL, dan Tim Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- i. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
- j. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- k. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- l. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- m. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- n. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- o. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada :
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- p. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- q. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- r. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- s. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- t. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- u. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- v. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- w. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- 5) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- x. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - 1) Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) Arsip PPS.
 - y. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
 - z. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
 - aa. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah di jangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara untuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
2. DPPh sebagaimana dimaksud terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu Wilayah.
3. Keadaan tertentu meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan

digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII

PENUTUP

1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat berkoodinasi dengan Pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagai mana dimaksud, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten.
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar ccklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat mengungsi, untuk keadaan bencana alam atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020

NO.	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

NO.	KODE	NAMA
15.	Mode A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
22.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
23.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
24.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa Bilita s	Status Pereka man KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

Perkawinan (7) :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik

2. Disabilitas Intelektual

3. Disabilitas Mental

4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan

KTP-el :

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :

U : Ubah Data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...



PROVINSI :
KABUPATEN :

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

Perkawinan (7) :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik

2. Disabilitas Intelektual

3. Disabilitas Mental

4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :

KTP-el :

B : Belum Memiliki KTP-el

S : Sudah Memiliki KTP-el

P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal,

PPDP

(.....)



Model A.A-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :
Alamat :
No TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU;
2. Jenis dan Tahun Pemilihan;
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian;
5. Jumlah Keluarga;
6. Jumlah Pemilih;
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah;
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
9. Webside lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)

MODEL A.A.2-KWK
**Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Sekadau

BARCODE

Jadwal Pencocokan dan Penelitian
18 April - 17 Ags 2020



Webside :
lindungihakpilihmu.kpu.go.id

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

TELAH DI DATA DAN BERTEMU

TPS

DESA/KELURAHAN :
NAMA KK :
JUMLAH KELUARGA :
JUMLAH PEMILIH :
NAMA PEMILIH :

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Tanda Tangan
Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

Tanda Tangan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

.....



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT NO. TPS :
KABUPATEN/KOTA : NAMA PPDP :
KECAMATAN : NIK PPDP :
DESA/KELURAHAN : NO. HP :

No.	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I.	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II.	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			-
III.	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III	-	-	-
IV.	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V.	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI.	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
	JUMLAH			
VII.	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII.	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1 -KWK) dibagikan			
	Status Kepemilikan KTP-el			
		L	P	L+P
IX.	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A-KWK dan Model A.A.-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Perekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

..... , /...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



PROVINSI :
KABUPATEN :

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

Perkawinan (7) :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :

1 : Disabilitas Fisik

2. Disabilitas Intelektual

3. Disabilitas Mental

4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :

KTP-el :

B : Belum Memiliki KTP-el

S : Sudah Memiliki KTP-el

P : Perekaman KTP-el

*) Keterangan (14) :

U : Ubah Data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,

PPDP

(.....)

Hal ... dari



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH PPS

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
Total														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SURAT

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)	(.....)
2. Anggota	(.....)	(.....)
3. Anggota	(.....)	(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH PPK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
Total															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)	(.....)
2. Anggota	(.....)	(.....)
3. Anggota	(.....)	(.....)
4. Anggota	(.....)	(.....)
5. Anggota	(.....)	(.....)



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A.1-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan
KTP-el :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan diTanggal,
KPU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

(.....)



PROVINSI :
KABUPATEN :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU

Model A.1.1-KWK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal

KPU KABUPATEN SEKADAU

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)	(.....)
2. Anggota	(.....)	(.....)
3. Anggota	(.....)	(.....)
4. Anggota	(.....)	(.....)
5. Anggota	(.....)	(.....)



Model A.1.A-KWK

**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020**

Pada hari, TanggalKPU kabupaten/PPK/PPS *).....

Menerima Tanggapan dan Masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilih/Peserta Pemilihan *)

Materi/alas an memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan Elemen data Pemilih	
2.	Pemilih belum terdaftar	
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	

Data dukungan tanggapan dan masukan berupa :

1.	Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan	
2.	Dokumen Elektronik dalam bentuk exel/csv/PDF	
3.	Lainnya	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

.....,, 2020

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

* coret yang tidak perlu.



PROVINSI :
KABUPATEN :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :
KTP-el :
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perkawinan

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicaput

10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



PROVINSI :
KABUPATEN :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH PPS

Model A.2.1-KWK

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
Total														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SURAT

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)	(.....)
2. Anggota	(.....)	(.....)
3. Anggota	(.....)	(.....)



PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH PPK

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
Total														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)	(.....)
2. Anggota	(.....)	(.....)
3. Anggota	(.....)	(.....)
4. Anggota	(.....)	(.....)
5. Anggota	(.....)	(.....)



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

:
:
:

Model A.3-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan diTanggal,,
KPU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

(.....)



PROVINSI
KABUPATEN

:
:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU

Model A.3.1-KWK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal

KPU KABUPATEN SEKADAU

	Nama	Tanda Tangan
6. Ketua	(.....)	(.....)
7. Anggota	(.....)	(.....)
8. Anggota	(.....)	(.....)
9. Anggota	(.....)	(.....)
10. Anggota	(.....)	(.....)



PROVINSI :
KABUPATEN :

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kel : , 2020
3. Kecamatan : Ketua,
4. Kab/Kota :
5. Provinsi : Kalimantan Barat (.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kel : , 2020
3. Kecamatan : Ketua,
4. Kab/Kota :
5. Provinsi : Kalimantan Barat (.....)



PROVINSI
KABUPATEN

- 22 -

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

Model A.Tb-KWK

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan KTP-el :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
KELOMOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

Hal ... dari ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Valipus Apen